

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-nya dapat menyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2023. Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran kegiatan per tahun yang telah disusun dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023.

Materi Penyusunan Kegiatan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 dan kegiatan – kegiatan lain yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat yang ada di masing-masing bidang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Kami menyadari bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, namun demikian diharapkan Program dan Kegiatan yang terkandung didalamnya dapat dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

Kepada semua pihak yang telah turut berperan serta didalam penyusunan Rencana Kerja ini, kami menyampaikan banyak terima kasih dan kami menyadari masih banyak kekurangan mengingat berbagai keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, kami berharap ada koreksi, kritik dan saran membangun demi kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Purwakarta, Oktober 2022

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PURWAKARTA**



**Drs. R. Deden Guntari**  
NIP. 19640228 199203 1 006

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional dibangun secara makro oleh Pemerintah Pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap Kabupaten/Kota diwajibkan melakukan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJMD dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD, kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada Undang - Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabuapten Purwakarta Tahun 2018 - 2023, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023, yang menyatakan bahwa visi Bupati Purwakarta adalah “**Mewujudkan Purwakarta Istimewa**”. Dimana visi ini mempunyai makna adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif-konstektual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 sila dari Pancasila.

Sedangkan Misi Bupati Purwakarta tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

- Misi :
1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
  2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Bersih Dan Profesional;

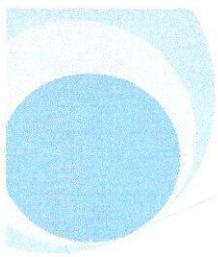
3. Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan;
4. Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa,.

Dari 4 (empat) Misi di atas, Pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta berada pada misi ke 3 (tiga ) dengan tujuan dan sasarannya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.1. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purwakarta**

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran
<p><b>Misi Ketiga :</b></p> <p>Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan..</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan Pembangunan Insfrastuktur, Penaatan Ruang, Pengembangan Wilayah, dan Lingkungan Hidup.</li> <li>➤ Mengembangkan Pariwsata Berwawasan Lingkungan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Inprastuktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah.</li> <li>➤ Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>➤ Meningkatnya Kunjungan Wisatawan.</li> </ul>

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Purwakarta periode tahun 2018 - 2023 tersebut di atas, maka Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta seperti yang tertuang dalam Renstra adalah **"MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN"**.



Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan aparatur yang peduli, taat dan profesional;
2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan pengawasan & mengendalikan pencemaran serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan lingkungan hidup.

Dari ketiga Misi yang ingin dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta ini dapat diuraikan sebagai berikut ini :

Misi 1, yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta adalah meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang terampil, capable dan professional akan berdampak pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DLH yang optimal;

Misi 2, menjadikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai instansi teknis yang mampu dan kredibel memiliki kewenangan di daerah untuk mengelola sumber daya alam dan mengendalikan keutuhan lingkungan hidup hulu maupun hilir, fisik maupun sosial;

Misi 3, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian serta Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup merupakan tupoksi dinas yang senantiasa dilakukan secara transparan dan professional serta mengikutkan peran serta masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup.

Dengan mengacu kepada visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta tersebut di atas, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2018 – 2023, sehingga akan lebih fokus dan terarah dalam menetapkan kebijakan dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagaimana dimaksud diatas.

Adapun Tujuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang professional dibidangnya;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan;



3. Mengembalikan kondisi sumber air, sungai & danau sebagai sumber kehidupan masyarakat, menjaga kualitas air, udara, tanah dan lingkungannya agar terhindar dari kehancuran sistem nilai hayati;
4. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan mengedepankan sinergitas antar instansi dan masyarakat;
5. Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
6. Penegakkan hukum lingkungan.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta untuk jangka waktu tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya aparatur yang profesional & memiliki kompetensi dalam bidang lingkungan hidup;
2. Mewujudkan laboratorium lingkungan yang terakreditasi;
3. Meningkatkan perlindungan konservasi sumber daya alam & keanekaragaman hayati;
4. Meningkatkan pengamanan sumber mata air;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan bidang lingkungan hidup;
6. Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan meningkatkan baku mutu lingkungan;
7. Meningkatnya penataan dan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa lingkungan.

Berdasarkan Visi Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut di atas , bahwa pengelolaan Lingkungan Hidup adalah suatu upaya terpadu untuk melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup yang meliputi kebijakan, perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan yang merupakan kesatuan utuh yang tidak terpisahkan.

Permasalahan lingkungan hidup akhir – akhir ini menjadi salah satu isu utama di dunia. Isu GLOBAL WARMING atau pemanasan global, disinyalir menyebabkan mencairnya es di kutub dan terjadinya perubahan iklim serta hilangnya pulau – pulau kecil akibat naiknya permukaan air laut. Namun inti utama penyebab GLOBAL WARMING diakibatkan adanya peningkatan emisi gas – gas rumah kaca (CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, Nox, dan SOx) yang berasal dari kegiatan manusia.

Penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca ini berasal dari sektor perindustrian, transportasi dan limbah yang dihasilkan oleh manusia selain akibat polusi oleh alam (mis ; gunung berapi dsb).

Degradasi lingkungan memang sangat pelik dan merupakan masalah yang sangat kompleks untuk diselesaikan. Terutama di Indonesia permasalahan lingkungan hidup meliputi banyak hal, dimulai dari tingginya laju peningkatan penduduk yang berimbas pada banyak nya lahan – lahan hijau yang beralih fungsi menjadi permukiman, menurunnya kualitas udara di kota – kota besar, pencemaran akibat limbah industri dan domestik, penanganan pengelolaan sampah yang tidak profesional, penurunan kualitas tanah karena pencemaran, banyaknya lahan kritis, deforestasi hutan, krisis air bersih, krisis sumber daya energi (minyak bumi, batubara dsb) yang semakin menipis, pola perilaku manusia yang tidak berwawasan lingkungan serta banyaknya kebijakan – kebijakan baik di pusat maupun di daerah yang tidak pro terhadap lingkungan sebagai salah satu penyumbang sebagian masalah lingkungan hidup yang cukup kompleks di Indonesia.

Secara umum kondisi Lingkungan Hidup di Kabupaten Purwakarta relatif masih cukup baik, namun dalam perkembangannya pembangunan dan peningkatan penduduk yang terus bertambah menyebabkan tekanan terhadap kerusakan Lingkungan Hidup cukup nyata di Purwakarta. Bertambahnya jumlah penduduk merupakan faktor utama yang memicu terjadinya perubahan lingkungan, sebagian besar pertambahan penduduk di Kabupaten Purwakarta berasal dari warga pendatang yang mencari pekerjaan di Purwakarta.

Banyaknya industri menjadi daya tarik tersendiri bagi warga pendatang untuk datang ke Kabupaten Purwakarta Dampak peningkatan jumlah penduduk di Purwakarta menyebabkan lahan – lahan pertanian dan ruang terbuka hijau banyak yang beralih fungsi menjadi permukiman, kemudian pertambahan jumlah sampah domestik yang dihasilkan ikut mencemari lingkungan, dan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi yang digunakan ikut pula menambah pencemaran udara di Kabupaten Purwakarta selain polusi dari cerobong industri.

Upaya untuk menangani persoalan Lingkungan Hidup tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua instansi saja, melainkan membutuhkan adanya keterpaduan dan koodinasi antar instansi melalui langkah-langkah koordinasi yang baik bahkan kalangan swasta dan masyarakat pun sangat dibutuhkan peran dan kesadarannya untuk mengantisipasi semakin kompleknya permasalahan lingkungan hidup yang ada pada saat ini.

Jika melihat letaknya, Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak di antara 107°30' – 107°40' Bujur Timur dan 6°25'– 6°45' Lintang Selatan. Secara administratif, Kabupaten Purwakarta mempunyai batas wilayah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Karawang dan Kab. Subang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor.

Kabupaten Purwakarta memiliki wilayah seluas 97.172 hektar, atau 971,72 km<sup>2</sup>. Secara geografis Kabupaten Purwakarta berada pada titik temu tiga jalur utama lalu lintas yang sangat strategis, yaitu jalur Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung dan Purwakarta-Cirebon.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 kecamatan, 183 Desa dan 9 Kelurahan, 476 Dusun, 1.021 Rukun Warga (RW), dan 2.959 Rukun Tetangga (RT), seperti yang tergambar dalam Tabel berikut dibawah ini :

**Tabel 1**  
**Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan**  
**Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta**

KECAMATAN	LUAS WILAYAH		JUMLAH DESA /KELURAHAN
	KM <sup>2</sup>	%	
1	2	3	4
1. Jatiluhur	60,11	6,19	10
2. Sukasari	92,01	9,47	5
3. Maniis	71,64	7,37	8
4. Tegalwaru	73,23	7,54	13
5. Plered	31,48	3,24	16
6. Sukatani	95,43	9,82	14
7. Darangdan	67,39	6,94	15
8. Bojong	68,69	7,07	14
9. Wanayasa	56,55	5,82	15
10. Kiarapedes	52,16	5,37	10
11. Pasawahan	36,96	3,80	12
12. Pondoksalam	44,08	4,54	11
13. Purwakarta	24,83	2,56	10
14. Babakancikao	42,40	4,36	9
15. Campaka	43,60	4,49	10
16. Cibatu	54,66	5,63	10
17. Bungursari	56,50	5,81	10
<b>JUMLAH</b>	<b>971,72</b>	<b>100,00</b>	<b>192</b>

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Dilihat dari aspek topografi, wilayah Kabupaten Purwakarta dapat dikelompokkan ke dalam tiga wilayah, yaitu :

a. Wilayah Pegunungan

Wilayah ini terletak di tenggara Kabupaten Purwakarta, dengan ketinggian 1.100 – 2.036 meter di atas permukaan laut dan meliputi 29,73 persen dari total luas wilayah;

b. Wilayah Perbukitan

Wilayah ini terletak di barat laut Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian 500 – 1.100 meter di atas permukaan laut dan meliputi 33,80 persen dari total luas wilayah;

c. Wilayah Dataran

Wilayah ini terletak di utara Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian 35 - 499 meter di atas permukaan laut dan meliputi 36,47 persen dari total luas wilayah.

Gambaran umum demografis wilayah Kabupaten Purwakarta, tercermin dari jumlah penduduk Purwakarta, pada tahun 2020 berdasarkan data hasil Sensus Penduduk tahun 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebanyak 950.066 jiwa. Dikarenakan Sensus Penduduk dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali (tahun berakhir 0), maka untuk tahun 2013 jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta menggunakan data proyeksi. Data penduduk Kabupaten Purwakarta tahun 2013 diprediksikan mencapai 898.300 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,94% (data proyeksi kinerja daerah RPJMD Tahun 2018-2023). Hal ini disebabkan selain akibat faktor pertumbuhan penduduk alami, juga dipengaruhi oleh faktor migrasi, baik migrasi masuk maupun migrasi keluar.

Dengan pengertian tersebut diatas, jelas bahwa Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi tanggung jawab semua pihak, yang meliputi subjek pengelola, penata dan semua unsur serta komponen objek Pengelolaan dan Penataan Lingkungan Hidup.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Peraturan – peraturan yang melandasi disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 54);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);

33. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 165 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
34. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 169 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022
35. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
36. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 54 Tahun 2022 Rencana Kerja Perangkat Daerah
37. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan yang memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan program - programnya dan juga keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta selama periode 1 (satu) tahun, yang disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 sehingga perencanaan tersebut dapat ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang lingkungan hidup dengan mendeskripsikan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan kedepannya yang dimulai dari perencanaan hingga penganggaran, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan yang direncanakan.

## **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup agar substansi pada Bab-Bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Lingkungan Hidup, proses penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup, keterkaitan antara Renja Dinas Lingkungan Hidup dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Lingkungan Hidup, dengan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat Penjelasan tentang Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan Pokok Bahasan dalam Penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup**

#### **Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup**

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tahun 2023 dan Perkiraan Pencapaian Tahun 2024, mengacu pada APBD Tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian Target Renstra Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Realisasi Program dan Kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup**

Berisikan kajian terhadap Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup**

Berisikan uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berisikan uraian mengenai : membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, penjelasan temuan dari hasil perbandingan.

### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang diusulkan para *stakeholders* yang terkait langsung dengan pelayanan.

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN**

### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Penelaahan yang menyangkut Arah Kebijakan, Prioritas Pembangunan Nasional dan yang terkait dengan Tugas pokok, dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup**

Merupakan suatu rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok, dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini mengemukakan rencana kerja program kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam table matrik.

## **BAB V PENUTUP**

Berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, dan pada bagian ini akan diuraikan mengenai *review* hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2024, serta progress pencapaian kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan program dan kegiatannya.

Rencana Kerja merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan juga merupakan bagian dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.

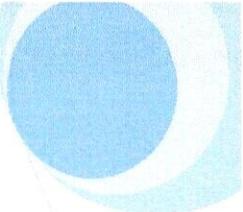
Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

**A. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

**B. Capaian dan Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2023**

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp. 41.177.804.477,- dengan 9 Program , 18 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan.



Tabel T-C.29.  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023  
Kabupaten Purwakarta

SKPD : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	2	3	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			9	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					6	7	8 = (7/6)		10	11
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keubaruan Kegiatan sampai dengan Tahun (n-3)	Target Renja Perangkat Daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (n-1)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
2.05.2.05.1.07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi perkantoran	100%	18.902.422.216	19.800.316.200	18.902.422.216	95,46 %			
2.05.2.05.1.07.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tem jasa surat menyurat yang dibutuhkan	100%	858.000	3.000.000	858.000	28,60 %			
2.05.2.05.1.07.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	100%	141.742.481	180.000.000	141.742.481	78,75 %			
2.05.2.05.1.07.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	100%	119.572.400	200.000.000	119.572.400	59,79 %			
2.05.2.05.1.07.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tus yang dibayarkan	100%	61.750.000	70.000.000	61.750.000	88,21 %			
2.05.2.05.1.07.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibayarkan	100%	63.910.000	94.203.000	63.910.000	67,84 %			

2.05.2.05.1.07.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	100%	18.920.000	25.000.000	18.920.000	75,68 %			
2.05.2.05.1.07.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibayarkan	100%	49.518.500	50.000.000	49.518.500	99,04 %			
2.05.2.05.1.07.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman yang dibayarkan	100%	11.100.000	25.000.000	11.100.000	44,40 %			
2.05.2.05.1.07.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dibayarkan	100%	55.411.200	65.000.000	55.411.200	85,25 %			
2.05.2.05.1.07.20	Penyediaan jasa Tenaga PTT	Jumlah jasa tenaga PTT yang dibayarkan	100%	2.017.320.000	2.068.240.000	2.017.320.000	97,54 %			
2.05.2.05.1.07.21	Festival Purwakarta Istimewa	Terpentingnya kebutuhan penunjang akan penyelenggaraan peringatan hari jadi Purwakarta	100%	-	-	-	-			
2.05.2.05.1.07.33	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang dibayarkan	100%	199.700.000	200.000.000	199.700.000	99,85 %			
2.05.2.05.1.07.35	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang dibayarkan	100%	193.272.500	200.000.000	193.272.500	-			
2.05.2.05.1.07.40	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang dibayarkan	100%	149.383.000	150.000.000	149.383.000	-			
2.05.2.05.1.07.42	Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	100%	686.917.561	700.000.000	686.917.561	98,13 %			

2.05.2.05.1.07.44	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor yang dibayarkan	100%	26.820.000	55.000.000	26.820.000	48,76 %		
2.05.2.05.1.07.61	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Pugas Retribusi Kebersihan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan pugas retribusi kebersihan yang digunakan	100%	72.520.000	75.000.000	72.520.000	-		
2.05.2.05.1.07.63	Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah pengadaan suku cadang kendaraan dinas operasional yang dibayarkan	100%	487.718.600	500.000.000	487.718.600	97,54 %		
2.05.2.05.1.07.64	Pemeliharaan rutin/berkala alat berat	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala alat berat yang dibayarkan	100%	144.056.950	200.000.000	144.056.950	-		
2.05.2.05.1.07.68	Pengadaan Pakaman Kerja Lapangan	Jumlah pengadaan pakaman kerja lapangan yang di bayarkan	100%	199.258.800	200.000.000	199.258.800	99,63 %		
2.05.2.05.1.07.75	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang di butuhkan	100%	-	-	-	-		
2.05.2.05.1.07.78	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah yang dibayarkan dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	3.480.000	5.000.000	3.480.000	69,60 %		
2.05.2.05.1.07.79	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun yang dibayarkan	100%	8.067.500	10.000.000	8.067.500	80,68 %		
2.05.2.05.1.07.82	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun SKPD	Jumlah yang dibayarkan dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun SKPD	100%	3.710.000	5.000.000	3.710.000	74,20 %		

2.05.2.05.1.07.83	Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Sebagai Pedoman dalam Penyusunan Laporan Asset dan Barang Milik SKPD	100%	-	5.000.000	-	100%		
2.05.2.05.1.07.87	Penyedia Jasa Tenaga Harian Lepas (THL)	Tertaksannya Penyedia Jasa Tenaga Harian Lepas (THL)	100%	8.955.550.000	9.150.000.000	8.955.550.000	97,87 %		
2.05.2.05.1.07.88	Premi Asuransi Pegawai Non PNS	Jumlah Premi Pembayaran BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS	100%	694.397.774	705.311.200	694.397.774	98,45 %		
2.05.2.05.1.07.90	Pemeliharaan Gedung kantor Persampahan	Tertaksannya pemeliharaan gedung kantor persampahan	100%	179.620.000	180.000.000	179.620.000	99,79 %		
2.05.2.05.1.07.91	Rehab Bangunan Toilet Bidang Persampahan	Memning kualitas pemeliharaan toilet bidang persampahan	100%	45.705.000	50.000.000	45.705.000	91,41 %		
2.05.2.05.1.07.92	Penyediaan BBM Kendaraan Dinas / Operasional	Memningkanya kualitas ketersediaan BBM kendaraan dinas / operasional	100%	3.892.309.950	4.200.000.000	3.892.309.950	92,67 %		
2.05.2.05.1.07.93	Pengadaan Aplikasi IT (Sistem Informasi) Lingkungan Hidup Kabupaten	Tertaksannya pengadaan aplikasi IT (sistem informasi) lingkungan hidup kabupaten purwakarta	100%	414.562.000	414.562.000	414.562.000	100 %		
2.05.2.05.1.07.94	Penyusunan Pelaporan LPPD	Tersedianya dokumen LPPD DLH	100%	750.000	5.000.000	750.000	15 %		
2.05.2.05.1.07.96	Penyusunan Perubahan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	100%	4.520.000	10.000.000	4.520.000	45,20 %		
<b>2.05.2.05.1.15</b>	<b>Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Jumlah Kendaraan Operasional Peningkatan Sampah</b>	<b>100%</b>	<b>2.860.783.710</b>	<b>2.986.825.000</b>	<b>2.860.783.710</b>	<b>95,78 %</b>		
2.05.2.05.1.15.16	Penyediaan Ekstra Fooding Bagi Petugas Lapangan	Memningkanya elektifitas kinerja pegawai	100%	195.092.000	200.000.000	195.092.000	97,55 %		
2.05.2.05.1.15.18	Pengadaan Tempat Sampah Organik dan Non Organik	Jumlah tempat sampah organik dan Non Organik yang dibeli	100%	98.003.600	100.000.000	98.003.600	98 %		
2.05.2.05.1.15.22	Peningkatan Kinerja Persampahan	Jumlah pelaksanaan kinerja persampahan pada waktu tertentu	100%	48.545.000	50.000.000	48.545.000	97,09 %		

2.05.2.05.1.15.23	Pengadaan Bin Sampah	Jumlah bin sampah yang dibeli	100%	98.093.000	100.000.000	98.093.000	98,09 %		
2.05.2.05.1.15.30	Pengadaan Perlatan Teknis	Jumlah perlatan teknis yang diadakan	100%	173.925.000	175.000.000	173.925.000	99,39 %		
2.05.2.05.1.15.35	Pembuatan Kompos di TPA Cikolotok	Jumlah kompos di TPA Cikolotok yang dihasilkan	100%	766.750	5.000.000	766.750	15,33 %		
2.05.2.05.1.15.38	Pengadaan Gerobak Sampah	Jumlah gerobak sampah yang jadi	100%	71.922.800	75.000.000	71.922.800	95,9 %		
2.05.2.05.1.15.40	Rekondisi Mobil Pengangkut Sampah	Jumlah mobil pengangkut sampah yang direkondisi	100%	93.686.060	100.000.000	93.686.060	93,69 %		
2.05.2.05.1.15.42	Pengadaan Bak Kontainer Sampah	Jumlah bak kontainer sampah yang dibeli	100%	97.070.000	100.000.000	97.070.000	97,07		
2.05.2.05.1.15.43	Pengadaan Tanah Urugan (Landfill) di TPA	Jumlah tanah urugan (landfill) untuk TPA Cikolotok yang dibeli	100%	198.324.000	200.000.000	198.324.000	99,16 %		
2.05.2.05.1.15.47	Pengadaan Mobil Kebersihan	Jumlah mobil kebersihan yang diadakan	100%	497.840.000	500.000.000	497.840.000	99,57 %		
2.05.2.05.1.15.50	Pembuatan Pos Jaga Petugas Retribusi	Jumlah pos jaga petugas retribusi yang dibangun	100%	64.300.000	75.000.000	64.300.000	85,73 %		
2.05.2.05.1.15.51	Perbaikan Jalan TPA Cikolotok	Panjang jalan TPA Cikolotok yang diperbaiki	100%	96.910.000	100.000.000	96.910.000	96,91 %		
2.05.2.05.1.15.53	Managemen Persampahan	Tersusunnya dokumen kegiatan pengolahan sampah di Kabupaten Purwakarta	100%	286.825.000	286.825.000	286.825.000	100 %		
2.05.2.05.1.15.57	Pembuatan Tempat Pencucian Kendaraan Pengangkut Sampah di Gamsi Pool Angkutan Sampah	Luas tempat pencucian kendaraan pengangkut sampah yang dibangun	100%	45.928.000	50.000.000	45.928.000	91,86 %		
2.05.2.05.1.15.58	Pembuatan TPS	Jumlah TPS (Tempat Penampungan Sampah)	100%	97.668.000	100.000.000	97.668.000	97,67 %		
2.05.2.05.1.15.59	Pengadaan dan Pembuatan Jembatan Timbang di TPA Cikolotok	Tertaksananya pengadaan dan pembuatan jembatan timbang di TPA Cikolotok	100%	-	-	-	-		
2.05.2.05.1.15.60	Penyusunan Database dan Identifikasi Subjek dan Objek Retribusi Kebersihan / Persampahan Kabupaten Purwakarta	Jumlah dokumen penyusunan data base dan identifikasi subjek dan objek retribusi kebersihan / persampahan kabupaten purwakarta yang disusun	100%	49.203.000	50.000.000	49.203.000	98,41 %		
2.05.2.05.1.15.63	Pemeliharaan Mobil Toilet	Jumlah mobil toilet yang dipelihara	100%	75.102.500	75.000.000	75.102.500	99,86 %		

2.05.2.05.1.15.65	Kompensasi TPA Cikolotok Desa Margasari	Jumlah pemberian kompensasi terhadap masyarakat sekitar TPA Cikolotok	100%	197.688.000	200.000.000	197.688.000	98,84 %		
2.05.2.05.1.15.66	Pengadaan Publikasi Layanan Pemasalahan		100%	97.625.000	100.000.000	97.625.000	97,62 %		
2.05.2.05.1.15.67	Pengerukan Kolam IPLT		100%	144.609.000	150.000.000	144.609.000	96,41 %		
2.05.2.05.1.15.68	Operasional Bank Sampah Indah Purwakarta		100%	34.250.000	95.000.000	34.250.000	36,05 %		
2.05.2.05.1.15.70	Perbaikan (Overhol) Excavator PC 200		100%	97.407.000	100.000.000	97.407.000	97,41 %		
<b>2.05.2.05.1.16</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Jumlah Target Pembinaan</b>	<b>100%</b>	<b>110.621.000</b>	<b>152.000.000</b>	<b>110.621.000</b>	<b>72,78 %</b>		
2.05.2.05.1.16.17	Pembinaan dan Pemantauan Penerapan AMDAL, UKL - UPL	Jumlah Target Pembinaan	100%	37.114.000	50.000.000	37.114.000	74,23 %		
2.05.2.05.1.16.20	Bintek Komisi AMDAL	Jumlah Dokumen Amdal	100%	-	25.000.000	-	0 %		
2.05.2.05.1.16.28	Penyusunan Dokumen SLHD / DIKLH	Jumlah dokumen informasi kajian lingkungan hidup	100%	71.867.000	75.000.000	71.867.000	95,82 %		
2.05.2.05.1.16.29	Penyusunan Kajian Pemanfaatan Sumber - Sumber Mata Air di Kabupaten Purwakarta	Jumlah dokumen kajian pemanfaatan sumber-sumber mata air	100%	1.640.000	2.000.000	1.640.000	82 %		
<b>2.05.2.05.1.17</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	<b>Persentase Sumber Daya Alam (Mata Air yang terjaga dan terlindungi)</b>	<b>100%</b>	<b>67.886.550</b>	<b>100.000.000</b>	<b>67.886.550</b>	<b>67,89 %</b>		
2.05.2.05.1.17.10	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen perencanaan (DED) untuk pembangunan Taman keanekaragaman Hayati	100%	22.552.000	50.000.000	22.552.000	45,1 %		
2.05.2.05.1.17.20	Perlindungan Sumber Daya Air	Jumlah pelaksanaan penanaman pohon disekitaran mata air	100%	45.334.550	50.000.000	45.334.550	90,67 %		
<b>2.05.2.05.1.25</b>	<b>Program Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</b>	<b>Jumlah Perusahaan Yang Dniali Kinerjanya dalam</b>	<b>100%</b>	<b>77.240.400</b>	<b>100.000.000</b>	<b>77.240.400</b>	<b>77,24 %</b>		

		Pengelolaan Lingkungan Hidup									
2.05.2.05.1.25.01	Pelaksanaan Pencegahan Perencanaan Air	Jumlah pelaksanaan pelayanan pencegahan air	100%	32.899.000	50.000.000	32.899.000	65,8 %				
2.05.2.05.1.25.02	Pelaksanaan Pencegahan Perencanaan Udara	Jumlah pelaksanaan pelayanan pencegahan perencanaan udara	100%	44.341.400	50.000.000	44.341.400	88,58 %				
2.05.2.05.1.26	Program Penyadaran dan Penegakan Hukum Lingkungan	Jumlah Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan yang ada di Kabupaten Purwakarta	100%	166.562.100	250.000.000	166.562.100	66,62 %				
2.05.2.05.1.26.07	Verifikasi Pengadaan Akibat Dugaan Perencanaan Lingkungan	Jumlah dokumen pos pengadaan	100%	42.822.600	50.000.000	42.822.600	85,65 %				
2.05.2.05.1.26.08	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pengadaan Lingkungan	Penerimaan pengadaan	100%	-	-	-	-				
2.05.2.05.1.26.09	Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata	Jumlah sosialisasi pembinaan sekolah berbudaya lingkungan dan sekolah Adiwiyata	100%	40.174.500	100.000.000	40.174.500	40,17 %				
2.05.2.05.1.26.10	Peningkatan Kinerja Penilaian Kota Sehat / Adipura Tingkat Kabupaten Purwakarta	Jumlah titik pantau Adipura	100%	-	-	-	-				
2.05.2.05.1.26.11	Sosialisasi dan Edukasi Penegakan Hukum Lingkungan DAS Citarum	Aplikasi SIPP	100%	39.956.000	50.000.000	39.956.000	79,91 %				
2.05.2.05.1.26.12	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Jumlah pelaksanaan tindak lanjut dari pengawasan berupa teguran, sanksi administratif, peksaan pemerintah dan sanksi administratif teguran tertulis	100%	43.609.000	50.000.000	43.609.000	87,22 %				

2.05.2.05.1.27	Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah Parameter Kualitas Lingkungan yang Terakreditasi	100%	450.425.000	475.000.000	450.425.000	94,83 %		
2.05.2.05.1.27.01	Penyediaan Bahan Kimia Laboratorium	Jumlah pengadaan bahan kimia labororium	100%	98.875.000	100.000.000	98.875.000	98,87 %		
2.05.2.05.1.27.03	Peningkatan Kapasitas SDM Laboratorium	Jumlah pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia (SDM) labororium	100%	14.996.000	25.000.000	14.996.000	59,98 %		
2.05.2.05.1.27.05	Penunjang Akreditasi Laboratorium	Jumlah pelaksanaan uji profesiensi labororium, audit internal, kaji ulang manajemen dan persiapan rekrudifikasi labororium	100%	38.987.000	50.000.000	38.987.000	77,97 %		
2.05.2.05.1.27.07	Perawatan (Maintenance) dan Kalibrasi Alat Laboratorium	Jumlah pelaksanaan perawatan (maintenance) dan kalibrasi alat labororium	100%	48.530.000	50.000.000	48.530.000	97,06 %		
2.05.2.05.1.27.09	Pengadaan Perlalatan Laboratorium	Jumlah pengadaan peralatan labororium	100%	24.037.000	25.000.000	24.037.000	96,15 %		
2.05.2.05.1.27.11	Peningkatan Kinerja Pembantu Tenaga Teknis Laboratorium	Jumlah pengadaan alat labororium	100%	225.000.000	225.000.000	225.000.000	100 %		
2.05.2.05.1.27.13	Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan (DAK FISIK)	Jumlah pengadaan alat labororium	100%	-	-	-	-		
2.05.2.05.1.30	Program Pengelolaan Sedot Tinja	Titik Pantau	100%	114.042.500	130.000.000	114.042.500	87,72 %		
2.05.2.05.1.30.02	Pembuatan Sticker Layanan Sedot Tinja	Tertaksananya kegiatan pembuatan sticker layanan sedot tinja	100%	-	10.000.000	-	0 %		
2.05.2.05.1.30.07	Pengadaan Pompa Mesin Sedot Tinja	Jumlah pompa mesin sedot tinja yang dibeli	100%	66.742.500	70.000.000	66.742.500	95,35 %		
2.05.2.05.1.30.09	Pengadaan Bolt Pipap	Jumlah Bolt Pipap yang dibeli	100%	47.300.000	50.000.000	47.300.000	94,6 %		
2.05.2.05.1.37	Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Tingkat Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim	100%	43.620.000	100.000.000	43.620.000	43,62 %		

2.05.2.05.1.37.03	Pengembangan Kampung Iklim	Jumlah pelaksanaan pembinaan lokasi proklam dan tersosialisasinya kampung iklim	100%	43.620.000	100.000.000	43.620.000	43,62 %			
2.05.2.05.1.37.04	Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Jumlah laporan inventarisasi gas rumah kaca di Kabupaten Purwakarta	100%	-	-	-	-			
<b>2.05.2.05.1.38</b>	<b>Program Pengendalian Lingkungan Hidup</b>	<b>Jumlah Peserta Kegiatan Properda</b>	<b>100%</b>	<b>187.332.000</b>	<b>325.000.000</b>	<b>187.332.000</b>	<b>57,64 %</b>			
2.05.2.05.1.38.01	Gerakan Peduli Pengendalian DAS Citarum ( Festival )	Jumlah pelaksanaan festival Gerakan Masyarakat Citarum Harum	100%	-	-	-	-			
2.05.2.05.1.38.03	Pelaksanaan PROPERDA	Jumlah pelaksanaan pelatihan kinerja perusahaan peserta Properda	100%	141.845.000	150.000.000	141.845.000	94,56 %			
2.05.2.05.1.38.04	Verifikasi Teknis Izin Pembuangan Air Limbah dan Limbah B3	Jumlah pelaksanaan verifikasi teknis permohonan rekomendasi izin pembuangan air limbah dan izin penyimpanan sementara dan pengumpulan skala kabupaten	100%	26.710.000	50.000.000	26.710.000	53,42 %			
2.05.2.05.1.38.05	Pemantauan Kualitas Air Permukaan Sungai Ciamaya	Jumlah pemantauan kualitas air sungai citarum dan ciamaya dan pemantauan kualitas udara ambien	100%	8.432.000	75.000.000	8.432.000	11,24 %			
2.05.2.05.1.38.08	Pembinaan dan Pemngawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kewajiban pengelolaan lingkungan	100%	10.345.000	50.000.000	10.345.000	20,69 %			



2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD							9.938,100	0	0
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD							9.927,900	0	0
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD							14.900,200	0	0
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							19.926,200	0	0
2.11.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>13.424.404.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							13.394.408,759	0	0
2.11.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							14.996,200	0	0
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							14.999,900	0	0
3.681.7502.11.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>								<b>15.000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rencana Kerja Tahun 2023

2.11.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						15.000.000	0	0
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah							254.292.782	0	0
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaiannya Atribut Kelengkapannya (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Paket Pakaiannya beserta Atribut Kelengkapannya						425.000.000	0	0
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						50.000.000	0	0
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							6.307.290.000	0	0
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						34.999.400	0	0
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						44.998.800	0	0
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						6.077.691.800	0	0
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						50.000.000	0	0
2.11.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan Tamu						25.000.000	0	0
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						74.600.000	0	0

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

2.11.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									230,000,000	0	0
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan								30,000,000	0	0
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan								200,000,000	0	0
2.11.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									12,204,236,344	0	0
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat								5,000,000	0	0
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								249,973,584	0	0
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								11,949,262,760	0	0
2.11.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									2,067,225,802	0	0
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya								100,000,000	0	0
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								1,850,000,000	0	0
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								125,471,985	0	0

2.11.01.2.09.10	Peneliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi						130,004,000	0	0
2.11.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>							<b>400,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.11.02.2.01	<b>Rencana Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPP LH) Kabupaten/Kota</b>							<b>400,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPP LH Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Muanan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPP LH Kabupaten/Kota yang Disusun						100,000,000	0	0
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPP LH Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPP LH Kabupaten/Kota						300,000,000	0	0
2.11.03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>							<b>1,132,397,289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.11.03.2.01	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>							<b>1,057,397,289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut ((U/PTD Laboratorium Lingkungan Hidup)	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						100,000,000	0	0
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan						175,000,000	0	0

	Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dinas Lingkungan Hidup)	Laut																		
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan																		
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mula yang Dilaksanakan																		
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																			
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan																		
2.11.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>																			
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3																			
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Laporan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Laporan Pemenuhan Ketentuan																		



Rencana Kerja Tahun 2023

2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							50,000,000	0	0
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH							100,000,000	0	0
2.11.08	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>								400,000,000	0	0
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								50,000,000	0	0
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan							350,000,000	0	0
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Masyarakat/Selompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat							50,000,000	0	0
2.11.09	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>								100,000,000	0	0
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								100,000,000	0	0
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia							100,000,000	0	0



*Rencana Kerja Tahun 2023*

2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada						200.000.000	0	0
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------	---	---

*Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta*

Pada pencapaian pelaksanaan Capaian Kinerja Tahun 2023, semua Program dan Kegiatan belum teralisasi secara maksimal dalam laporan triwulan 1. Diharapkan pelaksanaan program / kegiatan keberhasilan capaian kinerja fisik maupun keuangan mencapai 100 % sesuai dengan target rencana, dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi anggaran.

Pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023 serta perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2024 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Periode 2018 - 2023, dikarenakan Rencana Kerja 2023 masih dalam tahun berjalan.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup**

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diantaranya adalah kewenangan urusan wajib yang harus dikelola daerah Kabupaten/Kota yaitu salah satunya Urusan di Bidang Lingkungan Hidup, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016, dimana salah satu isinya adalah pembentukan lembaga teknis yang mengurus pengelolaan lingkungan hidup di daerah yaitu berbentuk Dinas Lingkungan Hidup.

Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten Purwakarta di Dinas Lingkungan Hidup. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi kepada lembaga swadaya masyarakat dan mitra kerja di bidang lingkungan hidup;
- c. Perumusan bahan kebijakan Bupati di bidang lingkungan hidup;
- d. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan teknis operasional di bidang pencegahan lingkungan hidup;
- e. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengendalian lingkungan hidup;
- f. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan teknis operasional dibidang konservasi sumberdaya alam;
- g. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan teknis operasional dibidang informasi dan kemitraan lingkungan;
- h. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan teknis administratif yang meliputi program, keuangan, urusan umum dan kepegawaian;

- i. Pembinaan terhadap unit pelayanan teknis badan dalam lingkup tugasnya;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta memiliki Sumber Daya Manusia sejumlah 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) orang pegawai yang berstatus PNS dengan berlatar belakang pendidikan dan bidang yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.3 Data Pegawai Tahun 2023**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta**

No	Uraian	Jumlah Pegawai
1	2	3
1	<b>Pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan :</b>	
	1. SD	28
	2. SMP	23
	3. SMA	47
	4. Sarjana Muda (D1 – D3)	-
	5. S 1 dan D 4	19
	6. S 2	11
	<b>Jumlah</b>	<b>128 Orang</b>
2	<b>Pegawai berdasarkan pangkat/golongan :</b>	
	1. Golongan I	33
	2. Golongan II	62
	3. Golongan III	22
	4. Golongan IV	11
	<b>Jumlah</b>	<b>128 orang</b>
3	<b>Pegawai berdasarkan jabatan :</b>	
	1. Eselon II	1
	2. Eselon III	5
	3. Eselon IV	17
	4. Eselon V	-
	5. Staf	105
	<b>Jumlah</b>	<b>128 orang</b>
4	1. Pegawai Tenaga Tetap	51
	2. Pegawai Tenaga Harian Lepas	338
	<b>Jumlah</b>	<b>389 orang</b>

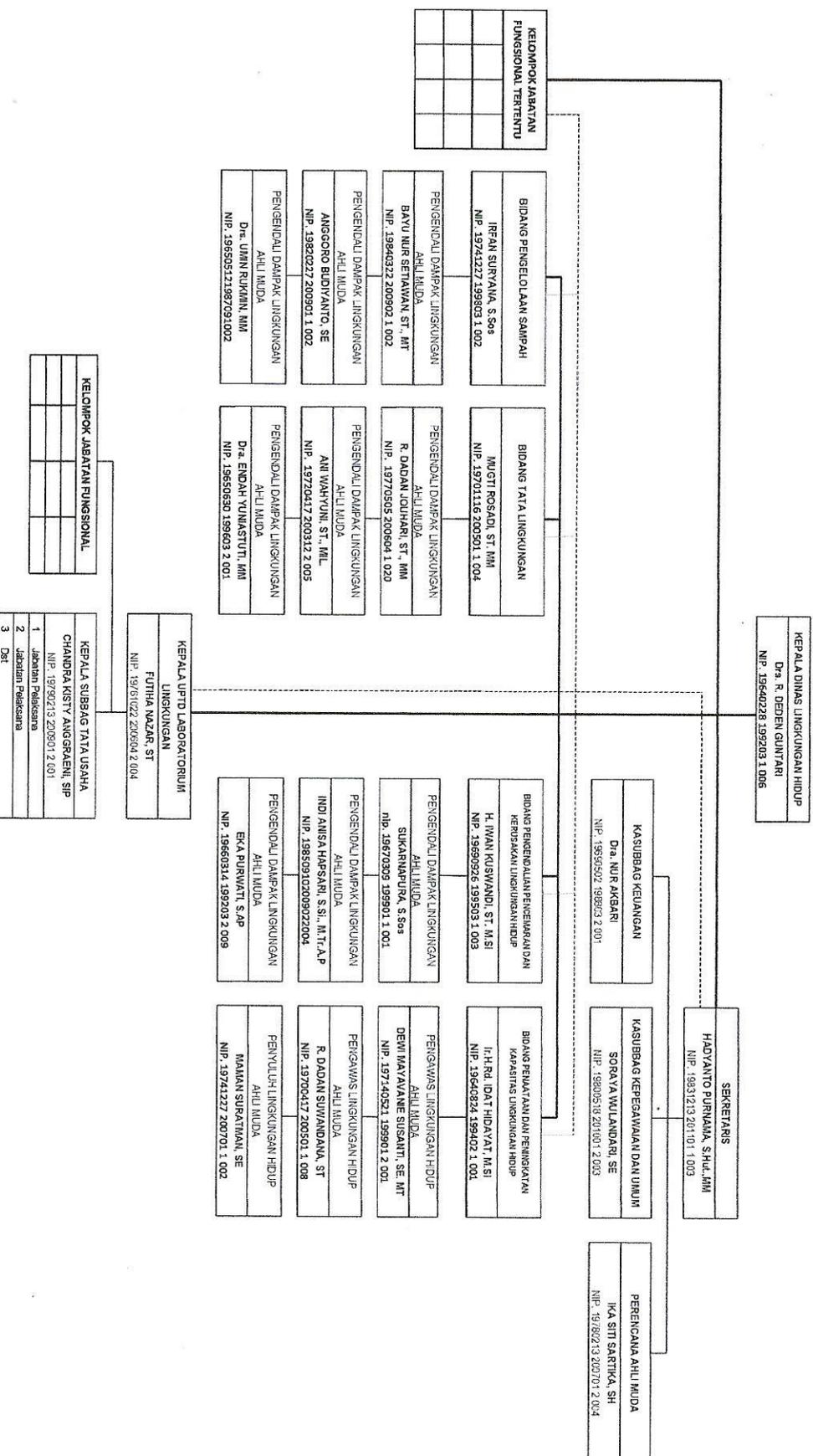
Sumber : Bagian Kepegawaian

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat dan Susunan dan Peraturan Bupati 165 Tahun 2016 Tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan hidup terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
  - ❖ Perencana Ahli Muda Sub sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan;
  - ❖ Sub Bagian Keuangan;
  - ❖ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
  - ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
  - ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
  - ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
4. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi :
  - ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
  - ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
  - ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi :
  - ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
  - ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
  - ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda.
6. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi :
  - ❖ Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda;
  - ❖ Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda;
  - ❖ Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda.
7. UPTD Laboratorium
  - ❖ Kepala Subbag Tata Usaha
8. Kelompok Jabatan Fungsional

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA

Sesuai Peraturan Bupati Purwakarta  
 Nomor : 286 Tahun 2021  
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja  
 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta



Selain tugas pokok di atas, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi pelayanan pada masyarakat yang didasari atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yang kemudian di dukung dengan Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Walau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Bab IV Pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan bahwa urusan lingkungan hidup termasuk salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, tetapi hal tersebut bukan menjadi halangan atau hambatan dalam memberikan pelayanan dibidang Lingkungan Hidup kepada masyarakat, karena pelayanan bidang lingkungan hidup merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh oleh setiap warga secara minimal demi terciptanya lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Pelayanan bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan. Adapun fungsi pelayanan yang di maksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 72 tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Pencemaran Air;
2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber tidak bergerak;
3. Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa;
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan hidup.

TABEL T-C 30  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. PURWAKARTA

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup									Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	SPM Permen LH No.19 tahun 2008															
1	% jumlah usaha dan atau kegiatan yang mematuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100%	-	100%	100 titik	120 titik	120 titik	150 titik	89 titik	100 titik	120 titik					
	% jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	100%	-	100%	20 titik	30 titik	30 titik	50 titik	20 titik	20 titik	30 titik					
	% luasan lahan dan atau tanah untuk produksi biomasa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100%	-	100%	2 lok/titik	2 lok/titik	2 lok/titik	2 lok/titik	-	2 lok/titik	2 lok/titik					
	% jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	90%	-	90%	65%	80%	85%	90%	105,9%	85%	90%					

### **2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup**

Dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta tetap mempertimbangkan isu – isu penting sebagai bentuk tantangan kedepannya terhadap perkembangan Kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi ditentukan oleh Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana.

Selain itu penentuan isu – isu penting / strategis harus didasarkan pada realitas dan kondisi saat ini dan masa yang akan datang, dimana setiap perubahan yang terjadi akibat kegiatan manusia akan selalu berdampak pada kualitas lingkungan hidup. Perubahan ini akan menjadi isu penting/strategis yang harus dicari solusinya. Beberapa faktor terkait hal tersebut adalah :

#### **a. Faktor Internal :**

##### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat menjembatani antara Perusahaan dan masyarakat dalam bidang lingkungan hidup sehingga apa yang diinginkan oleh berbagai pihak dapat dilaksanakan dengan baik dan terencana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

##### **2. Sumber Daya Manusia Aparatur**

Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur yang handal dan profesional dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan mengikut sertakan dalam pendidikan dan pelatihan teknis bidang lingkungan maupun teknis lainnya.

##### **3. Sarana dan Prasarana**

Pemenuhan sarana dan prasarana terus dilakukan dalam upaya tuntutan tugas ke depannya dalam mendukung manajemen pengelolaan bidang lingkungan hidup yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.

4. Anggaran

Peningkatan Anggaran Bidang Lingkungan Hidup yang tidak terlalu signifikan yang diberikan oleh APBD mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Bidang Lingkungan Hidup.

**b. Faktor Eksternal :**

1. Globalisasi

Perkembangan Kemajuan Teknologi dan Industri di era globalisasi ini, menuntut Pemerintah Daerah mengikuti perkembangan teknologi agar aparatur dapat bersaing tinggi dan dituntut untuk memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang sejajar. Pertumbuhan industri yang maju juga berdampak pada lingkungan hidup disekitarnya, bisa mengakibatkan global warming yang mempengaruhi udara ambient. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta dituntut untuk siap menghadapi segala permasalahan lingkungan hidup pada era globalisasi ini.

2. Peraturan Perundang – Undangan

Penegakan peraturan perundang – undangan dibidang lingkungan hidup harus benar – benar dilaksanakan agar adanya efek jera terhadap usaha/kegiatan yang melakukan pencemaran baik udara, tanah maupun air. Disatu pihak Dinas Lingkungan Hidup harus sebagai Stakeholder di Bidang Lingkungan Hidup dituntut untuk menerapkan peraturan perundang-undangan ini secara baik dan tegas.

**2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023 disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purwakarta, yang mana sampai dengan saat Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ini disusun belum diterbitkan, sehingga kami tidak dapat melakukan review atas RKPD 2023.

Tabel T-C 31  
 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023  
 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				34,956,407,188	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				32,251,823,894			
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				95,000,000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35,000,000			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	14,845,900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12,500,000			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RK.A-SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen RK.A-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RK.A-SKPD	Dokumen	14,651,700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RK.A-SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen RK.A-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RK.A-SKPD	Dokumen	10,000,000			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RK.A-SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Perubahan RK.A-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RK.A-SKPD	Dokumen	10,810,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RK.A-SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Perubahan RK.A-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RK.A-SKPD	Dokumen	10,810,000			

Koordinasi dan Penyusunan DP-A-SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen DP-A SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DP-A SKPD	Dokumen	9.938,100	Koordinasi dan Penyusunan DP-A-SKPD	Jumlah Dokumen DP-A SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DP-A SKPD	Dokumen	9.938,100	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DP-A-SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Perubahan DP-A SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DP-A SKPD	Dokumen	9.927,900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DP-A-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DP-A SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DP-A SKPD	Dokumen	9.927,900	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	14.900,200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	14.900,200	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purwakarta	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	19.927,600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12.500,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.424.404,859	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.039,617,919	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Purwakarta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cang/Bulan	13.394.408,759	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cang/Bulan	13.012.317,919	

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	14.996,200	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12.300,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	14.999,900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	15.000,000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				15.000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				4.998,250	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Purwakarta	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	15.000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Purwakarta	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4.998,250	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				260.000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				254.998,200	
Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Purwakarta	Jumlah Paket Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	424.999,800	Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Purwakarta	Jumlah Paket Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	200.000,000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Purwakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	49.999,800	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Purwakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	54.998,200	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				6.300.524,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.923.838,300	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pemngan	Purwakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik atau	Paket	34.999,400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Purwakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik atau	Paket	29.890,900	

Bangunan Kantor		Perencanaan Bangunan Kantor yang Disediakan		Perencanaan Bangunan Kantor		Perencanaan Bangunan Kantor yang Disediakan	
Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Purwakarta	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Purwakarta	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Purwakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Purwakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Purwakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	Paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Purwakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	Paket
Facilitasi Kunjungan Tamu	Purwakarta	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan tamu	Paket	Facilitasi Kunjungan Tamu	Purwakarta	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan tamu	Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purwakarta	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purwakarta	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
Pengadaan Mebel	Purwakarta	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Pengadaan Mebel	Purwakarta	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit
Pengadaan Perlatan dan Mesin lainnya	Purwakarta	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin lainnya yang	Unit	Pengadaan Perlatan dan Mesin lainnya	Purwakarta	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin lainnya yang	Unit

		Disediakan						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.219.936,344	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.043.371,225
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5.000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purwakarta	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	249.973,584	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	250.799,345
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	11.964,962,760	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11.787.571,880
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.196.541,985	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.950.000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	110.000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Purwakarta	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100.000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit	2.970.000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Purwakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	1.750.000,000

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Purwakarta	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizannya	Unit	357,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Purwakarta	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizannya	Unit	357,500,000										
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Purwakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	Unit	621,500,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Purwakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	Unit											
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saprasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Purwakarta	Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Saprasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	495,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saprasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Purwakarta	Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Saprasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	100,000,000										
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup				400,000,000	Program Perencanaan Lingkungan Hidup				125,000,000										
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPPLH) Kabupaten / Kota				400,000,000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPPLH) Kabupaten / Kota				125,000,000										
	Penyusunan dan Penetapan RPPPLH Kabupaten / Kota	Purwakarta	Jumlah Muatan hasil Penyusunan dan Penetapan RPPPLH Kabupaten / Kota yang Disusun	Dokumen	100,000,000	Penyusunan dan Penetapan RPPPLH Kabupaten / Kota	Purwakarta	Jumlah Muatan hasil Penyusunan dan Penetapan RPPPLH Kabupaten / Kota yang Disusun	Dokumen	100,000,000										
	Pengendalian Pelaksanaan RPPPLH Kabupaten / Kota	Purwakarta	Jumlah Dokumen Telaah Kebijakan yang Telaah Mengakomodir RPPPLH Kabupaten /	Dokumen	300,000,000	Pengendalian Pelaksanaan RPPPLH Kabupaten / Kota	Purwakarta	Persentase Pelaksanaan RPPPLH Kabupaten / Kota	Dokumen	25,000,000										



<p>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p>		<p>Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten Kota yang Dilaksanakan</p>	<p>Laporan</p>	<p>75,000,000</p>	<p>Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat</p>	<p>Purwakarta</p>	<p>Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten Kota yang Dilaksanakan</p>	<p>Laporan</p>	<p>75,000,000</p>		
<p>Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat</p>	<p>Purwakarta</p>	<p>Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten Kota yang Dilaksanakan</p>	<p>Laporan</p>	<p>75,000,000</p>	<p>Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat</p>	<p>Purwakarta</p>	<p>Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten Kota yang Dilaksanakan</p>	<p>Laporan</p>	<p>75,000,000</p>		
<p>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</p>				<p>150,000,000</p>	<p>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</p>				<p>440,000,000</p>		
<p>Penyimpangan Sementara Limbah B3</p>		<p>Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Penentuan Kontinen Persetujuan Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3</p>		<p>50,000,000</p>	<p>Penyimpangan Sementara Limbah B3</p>		<p>Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Penentuan Kontinen Persetujuan Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3</p>		<p>110,000,000</p>		
<p>Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3</p>	<p>Purwakarta</p>	<p>Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Penentuan Kontinen Persetujuan Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3</p>	<p>Laporan</p>	<p>50,000,000</p>	<p>Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3</p>	<p>Purwakarta</p>	<p>Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Penentuan Kontinen Persetujuan Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3</p>	<p>Laporan</p>	<p>110,000,000</p>		
<p>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Purwakarta</p>			<p>100,000,000</p>	<p>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah</p>	<p>Purwakarta</p>			<p>330,000,000</p>		

*Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta*



Izin PPLH Diberikan Oleh Pemda Kab/Kota					dan Izin PPLH Diberikan Oleh Pemda Kab/Kota				
fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau	Purwakarta	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	150.000,000	fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau	Purwakarta	Persentase Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau	Dokumen	550.000,000
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan	50.000,000	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	Persentase Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	110.000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya	Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Dokumen	100.000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya	Purwakarta	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya	Dokumen	220.000,000
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan				400.000,000	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan				660.000,000

Hidup Untuk Masyarakat													
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Perubahan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah				400,000,000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Perubahan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah				660,000,000				
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Purwakarta	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	350,000,000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Purwakarta	Persentase Pendampingan Gerakan Lingkungan Hidup	Dokumen	605,000,000				
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Purwakarta	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat	Orang	50,000,000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Purwakarta	Lokasi	Orang	55,000,000				
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				100,000,000	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				165,000,000				
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah				100,000,000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah				165,000,000				
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia	Purwakarta	Jumlah Masyarakat/Lembaga	Entitas	100,000,000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga	Purwakarta	Persentase Penilaian Kinerja	Entitas	165,000,000				

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta



Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dimulai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Masyarakat/Dunia Usaha Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH						
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup					110,000,000	
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota					110,000,000	
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten / Kota	Purwakarta	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten / Kota yang Dihindakanjiti / Diangani	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten / Kota	Purwakarta	Persentase Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten / Kota	Dokumen	110,000,000		
Program Pengelolaan Persampahan			Program Pengelolaan Persampahan				2,109,935,163		
Pengelolaan Sampah			Pengelolaan Sampah				2,074,935,163		
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan	Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan	Pengurangan Sampah dengan melakukan	Purwakarta	Persentase Pengurangan Sampah	Laporan	110,000,000		

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

	Pemanfaatan Kembali		Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali			
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA	Purwakarta	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Dolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	3.000.000,000	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA	Purwakarta	Persentase Pengurangan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA	Ton	687.500,000
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Purwakarta	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	389.000,000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Purwakarta	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kelompok	1.298.000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk	Dokumen	200.000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Purwakarta	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana	Dokumen	280.000,000

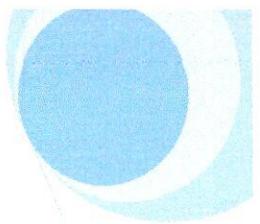




*Rencana Kerja Murni Tahun 2023*

TPA/PTSP/SPA Kabupaten Kota		Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Penggangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir								
TOTAL				41.177.804,477					52.183.073,684	

*Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta*



*Rencana Kerja Murni Tahun 2023*

*Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta*

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, dimana RKPD Kabupaten Purwakarta itu sendiri merupakan penjabaran dari Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025, terutama Pembangunan Jangka Menengah periode ke 5 Tahun 2018 -2023. Selain itu juga, dengan melihat pencapaian hasil kinerja tahun sebelumnya, isu strategis, serta merujuk pula target RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 dan prioritas pembangunan nasional yang sesuai dengan arah kebijakan dan Program Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 – 2023.

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Selain itu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Pentahapan Pembangunan RPJPN 2005 – 2025 yang berkaitan dengan Tantangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional periode RPJM 2020 – 2024 adalah Memantapkan Pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan Pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang

berkualitas serta kemampuan IPTEK. Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020 - 2024, Visi Pembangunan 2020 – 2024 adalah **Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**. Visi pembangunan diatas diurai menjadi 7 misi pembangunan dan diurai kembali menjadi 9 agenda prioritas atau yang disebut pula dengan **NAWACITA**.

Nawacita merupakan 9 agenda prioritas pembangunan nasional pemerintah periode 2015 – 2019, dimana ada 4 Nawacita yang terkait dengan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yaitu :

1. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
2. Mewujudkan kemnadirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik;
3. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum;
4. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun 2015 – 2019, serta kondisi umum lingkungan hidup saat ini, arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019 akan memprioritaskan pembangunan (Sasaran Strategis Nasional) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dicapai pada :

1. Peningkatan Produk hasil hutan dan pengembangan Jasa lingkungan :
  - a. Pengembangan KPH Produksi dan Produk Kayu;
  - b. Pengembangan KPH Lindung dan Hasil Hutan Bukan Kayu.
2. Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan serta Pengelolaan DAS :
  - a. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Kehutanan;
  - b. Peningkatan Konservasi dn Keanekaragaman Hayati;
  - c. Peningkatan Pengelolaan DAS.

3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan dan Pelestarian dan Pemanfaatan Perekonomian Kehati :
  - a. IKLH meningkat menjadi 66,5-68,6 di Tahun 2019;
  - b. Meningkatnya pemanfaatan Iptek dan SDM untuk peningkatan nilai ekonomi keanekaragaman hayati sebesar 100 %.
4. Penanganan Perubahan Iklim dan Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan :
  - a. Menurunnya emisi GRK di 5 sektor prioritas (kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi, transportasi dan industri dan limbah) sebesar mendekati 26 % di Tahun 2019;
  - b. Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di 15 daerah rentan yang merupakan daerah percontohan pelaksanaan RAN API.

Selain itu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023, pembangunan Dinas Lingkungan Hidup ditempatkan pada misi ke 3 yaitu **Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan**, dimana uraian dari misi ke 3 ini adalah bertujuan untuk :

Tujuan 1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup.

Tujuan 2. Mengembangkan Pariwisata Berwawasan Lingkungan.

Sasaran 1. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah.

Sasaran 2. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sasaran 3. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan.

Keterkaitan antara Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dengan 9 langkah Mewujudkan Purwakarta Istimewa diuraikan sebagai berikut :

“ Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan terdapat pada Langkah Ke 3+5+6 Dalam “ 9 Langkah Melanjutkan Purwakarta Istimewa.”

Pada Sasaran 2, salah satu kegiatan Tematik yang akan dilaksanakan adalah Pengendalian Pencemaran Limbah Industri, Limbah Domestik dan Pengelolaan Sampah dengan salah satu outputnya berupa terlaksananya penanganan pencemaran secara terpadu di DAS Citarum melalui **Gerakan Citarum Bestari**. Gerakan Citarum Bestari merupakan suatu gerakan dalam rangka mewujudkan pemulihan Sungai Citarum.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup**

Sebelum dirumuskan tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja ini, terlebih dahulu kami akan mengungkapkan kembali Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta yang tercantum dalam Rencana Strategis Periode 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

Adapun Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang professional di bidangnya;
2. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan;
3. Mengembalikan Kondisi Sumber Air, Sungai & Danau sebagai sumber kehidupan masyarakat, menjaga kualitas air, udara, tanah dan lingkungannya agar terhindar dari kehancuran sistem nilai hayati;
4. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan mengedepankan sinergitas antar instansi dan masyarakat;
5. Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

6. Penegakkan Hukum Lingkungan.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta untuk jangka waktu tahun 2018– 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya aparatur yang profesional & memiliki kompetensi dalam bidang lingkungan hidup;
2. Mewujudkan laboratorium lingkungan yang terakreditasi;
3. Meningkatkan perlindungan konservasi sumber daya alam & keanekaragaman hayati;
4. Meningkatkan pengamanan sumber mata air;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan bidang lingkungan hidup;
6. Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan meningkatkan baku mutu lingkungan;
7. Meningkatnya penataan dan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa lingkungan.

Namun demikian Target Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dapat dilihat pada **Tabel 3.1**.

**TABEL 3.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2023**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2023
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Manajemen Perkantoran Secara Optimal.	Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran.	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	100%
2	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan	Mewujudkan laboratorium lingkungan yang terakreditasi	Jenis alat uji yang telah memenuhi syarat akreditasi jenis sertifikat yang dimiliki aparat, sistem pengujian yang terbentuk	100%
3.	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan mengedepankan sinergitas antar instansi dan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan bidang Lingkungan Hidup.	Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.	100%
4.	Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung.	Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan meningkatkan baku mutu lingkungan.	Waktu penyelesaian perizinan lingkungan hidup	100%-
5.	Penegakan Hukum Lingkungan.	Meningkatnya penataan dan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa lingkungan.	Prosentase pengaduan dan sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan.	100%
6.	Terwujudnya peningkatan kapasitas pelayanan persampahan serta peningkatan kapasitas infrastruktur persampahan.	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana lingkungan, terpeliharanya kebersihan lingkungan dan perkotaan.	Meningkatnya persentase volume sampah yang ditangani.	100%

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Dalam menentukan usulan program dan Rencana Kegiatan Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup senantiasa mengacu kepada arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Purwakarta (RPJMD) dan Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk Tahun 2023. Visi Pembangunan Purwakarta untuk periode 2018 -2023 adalah “ **MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA**” dimana maksud dan penjelasan dari visi ini adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif-kontekstual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 sila dari Pancasila. Pola pembangunan terintegrasi yang didasarkan pada persenyawaan nilai dasar tanah, air, udara, dan matahari sebagai basis penciptaan manusia yang tercermin dari tata kota dan bangunan, tata kelola pemerintahan, tata kehidupan masyarakat yang berorientasi pada kemanunggalan, keparipurnaan dan kemuliaan sebagai bentuk pertanggungjawaban keterwakilan manusia di muka bumi yang dipilih oleh Allah SWT sebagai makhluk yang istimewa.

Penyusunan Rencana Kinerja 2023 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan Rencana Kinerja yang diusulkan oleh masing-masing bidang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan hasil Musrembang Kabupaten Purwakarta. Untuk Strategi Pembangunan Tahun 2022 Kabupaten Purwakarta mempunyai tema pokok pembangunan adalah “**MENYEMPURNAKAN TANGGA CINTA PURWAKARTA ISTIMEWA**”. Tema ini kemudian dijabarkan ke dalam arah kebijakan, sasaran dan program prioritas pembangunan daerah.

Tabel T-C 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakira Maju Tahun 2024 Kabupaten Purwakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakira Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.11.01	Program Pemungjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				34,956,407,188			57,909,226,255	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				95,000,000			78,750,000	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purwakarta	Dokumen	14,845,900	APBD	Dokumen	16,500,00	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Purwakarta	Dokumen	14,651,700	APBD	Dokumen	16,500,000	
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-S KPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Purwakarta	Dokumen	10,810,000	APBD	Dokumen	11,000,000	

		Dokumen Perubahan RKA SKPD							
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Purwakarta	Dokumen	9.938.100	APBD	Dokumen	11.000.000	
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Purwakarta	Dokumen	9.927.900	APBD	Dokumen	11.000.000	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Purwakarta	Dokumen	14.900.200	APBD	Dokumen	16.500.000	
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purwakarta	Dokumen	19.926.200	APBD	Dokumen	22.000.000	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.424.404.859			14.777.849.634	

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Purwakarta	Orang/Bulan	13.394,408,759	APBD	Orang/Bulan	14,733,849,634
2.11.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Purwakarta	Dokumen	14,996,200	APBD	Dokumen	22,000,000
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Purwakarta	Laporan	14,999,900	APBD	Laporan	22,000,000
2.11.01.2.03.01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				15,000,000			16,500,000
2.11.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Purwakarta	Dokumen	15,000,000	APBD	Dokumen	16,500,000
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				475,000,000			1,001,000,000
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Purwakarta	Paket	425,000,000	APBD	Paket	262,500,000
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Purwakarta	Orang	50,000,000	APBD	Orang	66,000,000

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					6,307,290,000				7,152,189,270
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Purwakarta	Paket		34,999,400	APBD		Paket	73,500,000
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Purwakarta	Paket		44,998,800	APBD		Paket	66,000,000
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Purwakarta	Paket		6,077,691,800	APBD		Paket	6,681,189,270
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	Purwakarta	Paket		50,000,000	APBD		Paket	66,000,000
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Purwakarta	Paket		25,000,000	APBD		Paket	44,000,000
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purwakarta	Paket		74,600,000	APBD		Paket	110,000,000
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang/ABK Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					230,000,000				66,000,000
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	Purwakarta	Unit		30,000,000	APBD		Unit	66,000,000

2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disediakan	Purwakarta	Unit	200,000,000	APBD	Unit	0
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Purwakarta	Unit	12,204,236,344	APBD	Unit	13,548,656,000
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purwakarta	Laporan	5,000,000	APBD	Laporan	5,500,000
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Purwakarta	Laporan	249,973,384	APBD	Laporan	330,000,000
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Purwakarta	Laporan	11,949,262,760	APBD	Laporan	13,213,156,000
2.11.01.09	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,205,475,985			3,036,000,000
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Peneliharaan, Biaya Peneliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Purwakarta	Unit	100,000,000	APBD	Unit	315,000,000
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan Dinas	Purwakarta	Unit	1,850,000,000	APBD	Unit	1,890,000,000

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																	
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	Purwakarta	Unit	125,471,985	APBD	Unit	330,000,000											
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sapsas Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara atau Direhabilitasi	Purwakarta	Unit	130,004,000	APBD	Unit	121,000,000											
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup				400,000,000			495,000,000											
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota				400,000,000			495,000,000											
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota	Jumlah Muatan hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota yang Disusun	Purwakarta	Dokumen	100,000,000	APBD	Dokumen	110,000,000											
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Telaah Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten / Kota	Purwakarta	Dokumen	300,000,000	APBD	Dokumen	385,000,000											
2.11.03	Program Pengendalian				1,132,397,289			660,000,000											

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

	Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				1.057.397.289				357.500.000
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut (UPTD Laboratorium)	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Purwakarta	Dokumen	100.000,000	APBD		Dokumen	247.500,000
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Purwakarta	Dokumen	175.000,000			Dokumen	175.000,000
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Purwakarta	Dokumen	100.000,000	APBD		Dokumen	110.000,000
2.11.03.2.01.02	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen	Purwakarta	Dokumen	682.397.289	APBD		Dokumen	682.397.289

		Mutu yang Dilaksanakan						
2.11.03.2.02	Penanggungan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			75.000.000				
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Purwakarta	Laporan	75.000.000	APBD	Laporan	302.500.000
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)				150.000,00			247.500.000
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3				50.000.000			82.500.000
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Purwakarta	Laporan	50.000.000	APBD	Laporan	82.500.000
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3		Purwakarta		100.000.000			165.000.000

	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Merjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya dan/atau	Purwakarta	Dokumen	100,000,000	APBD	Dokumen	165,000,000
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				300,000,000			605,000,000
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Dikerbitkan				300,000,000			605,000,000

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

	<b>Oleh Penda Kab/Kota</b>								
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan dan Kewajiban Izin Lingkungan dari/atau	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Purwakarta	Dokumen	150,000,000	APBD		Dokumen	385,000,000
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diberikan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota/Diberikan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Purwakarta	Laporan	50,000,000	APBD		Laporan	110,000,000
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Purwakarta	Dokumen	100,000,000	APBD		Dokumen	110,000,000
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				400,000,000				550,000,000
2.11.08.2.01	Penyediaan				400,000,000				550,000,000

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

	Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah										
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Purwakarta	Dokumen	350,000,000	APBD		Dokumen	495,000,000		
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlihat	Purwakarta	Laporan	50,000,000	APBD		Laporan	55,000,000		
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				100,000,000				157,500,000		
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah				100,000,000				157,500,000		
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Purwakarta	Entitas	100,000,000	APBD		Entitas	157,500,000		
2.11.10	Program Penanganan				50,000,000				78,750,000		

	Pengaduan Lingkungan Hidup								
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				50,000,000				78,750,000
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten / Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Dihadirkan/Ditangani	Purwakarta	Dokumen	50,000,000	APBD		Dokumen	78,750,000
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan				3,689,000,000				9,321,693,692
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah				3,689,000,000				9,242,943,692
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Purwakarta	Laporan	100,000,000	APBD		Laporan	183,750,000
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Purwakarta	Ton	3,000,000,000	APBD		Ton	1,601,250,000

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

	Kab.Kota								
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Purwakarta	Kelompok	389.000,000	APBD		Kelompok	630.000,000
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Purwakarta	Dokumen	200.000,000	APBD		Dokumen	6.827.943,692
<b>JUMLAH BELANJA OPERASIONAL</b>									
					<b>41.177.804,477</b>				<b>52.183.078,684</b>

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Adapun Rencana Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk tahun 2023 secara keseluruhan disajikan pada uraian berikut ini :

#### **Uraian Indikatif Program Rencana Kinerja DLH Tahun 2023**

Program yang ada di bidang Dinas Lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan untuk periode tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH;
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
10. Program Pengelolaan Persampahan.

**Rencana Indikatif Kegiatan Tahun 2023**

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2023
	<b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Rp. 95.000.000
	Sub Kegiatan :	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 14,845,900
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 14,651,700
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 10,810,000
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 9,938,100
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp. 9,927,900
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 14,900,200
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 19,926,200
	<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 13,424,404,859</b>
	Sub Kegiatan :	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 13,394,408,759
2.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Rp. 14,996,200
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 14,999,900
	<b>Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 15,000,000</b>
	Sub Kegiatan :	
1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 15,000,000

	<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 474,999,600</b>
	Sub Kegiatan :	
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 424,999,800
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 49,999,800
	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 6,300,524,000</b>
	Sub Kegiatan :	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 34,999,400
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 44,998,800
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 6,070,924,900
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 50,000,900
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 25.000.000
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 74,600,000
	<b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
1.	Pengadaan Mebel	Rp. 30,000,600
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 199,999,800
	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp. 12,219,936,344</b>
	Sub Kegiatan :	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 5.000.000
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 249,973,584

3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 11,964,962,760
	Kegiatan : <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda</b>	Rp. <b>2,196,541,985</b>
	Sub Kegiatan :	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 1,850,000,000
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 1.750.000.000
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 125,471,985
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 100.000.000

➤ **Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2023
	Kegiatan : <b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	Rp. 400,000,000
	Sub Kegiatan :	
1.	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Rp. 100.000.000
2.	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Rp. 300,000,000

➤ **Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2023
	Kegiatan : <b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	Rp. 1,057,397,289
	Sub Kegiatan :	
1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan thd Media Tanah, Air, Udara dan Laut (UPTD Laboratorium)	
2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan thd Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Rp. 175,000,000
3.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp. 100,000,000
4.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp. 682,397,289

➤ **Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahaya dan Beracun (Limbah B3)**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2023
	Kegiatan : <b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	Rp. 50.000.000
	Sub Kegiatan :	
1.	Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp. 50.000.000

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2023
	Kegiatan : <b>Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp. 100,000,000
	Sub Kegiatan :	
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi	Rp. 100,000,000

	dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan/atau penimbunan	
--	-------------------------------------------------------------------------	--

➤ **Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2023
	Kegiatan : <b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan Oleh Pemda Kab/Kota</b>	Rp. 300,000,000
	Sub Kegiatan	
1.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rp. 150,000,000
2.	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 50,000,000
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Rp. 100.000.000

➤ **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2022
	Kegiatan : <b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah</b>	Rp. 400,000,000
	Sub Kegiatan :	



1.	Pendampingan Gerakan Lingkungan Hidup	Rp. 125.000.000
2.	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Rp. 150.000.000

➤ **Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2023
	Kegiatan : <b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Daerah</b>	Rp. 350,000,000
	Sub Kegiatan :	
1.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	Rp. 50,000,000

➤ **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2022
	Kegiatan : <b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	Rp. 50,000,000
	Sub Kegiatan :	
1.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Rp. 50,000,000

➤ **Program Pengelolaan Sampah**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2022
	Kegiatan : <b>Pengelolaan Sampah</b>	Rp. 3,689,000,000

	Sub Kegiatan :	
1.	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Rp. 100,000,000
2.	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp. 3,000,000,000
3.	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp. 389,000,000
4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Rp 200,000,000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ini disusun, sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Periode 2018 – 2023, dimana Renstra dibuat sebagai upaya memberikan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta 2018 – 2023, khususnya yang terkait dengan pembangunan dibidang Lingkungan Hidup yang kemudian akan dijadikan pedoman dalam penyusunan usulan rencana kegiatan tahunan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2023 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang, dan diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, rangkaian kegiatan dapat terlaksana secara terencana, sistematis, mengandung nilai, bobot dan mampu mendorong serta memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Rencana Kerja tahun 2023 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2023 dalam penyusunan Rencana dan Kegiatan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat.

Selain itu dukungan maupun Political Will dari Pemerintah Daerah dan seluruh Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Purwakarta pada umumnya.

Setiap perencanaan tentu membutuhkan saran dan masukan dari berbagai pihak karena masih banyak kekurangannya, terutama pada saat implementasi serta operasional dilapangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan dan mudah – mudahan dapat di akomodasi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk tahun berikutnya. Kerjasama dan sinergitas adalah kunci utama dalam suksesnya suatu organisasi.

# LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. PURWAKARTA  
 TAHUN : 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2023	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang professional dibidangnya	Meningkatnya aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidang LH	Jumlah pejabat fungsional (PPLHD, PPNS, & Analis Kimia) & aparatur bersertifikat	15 Orang Pejabat Diklat PIN, 8 Orang Belum Mengikuti Diklat PIN	16 Orang Pejabat Diklat PIN, 7 Orang Belum Mengikuti Diklat PIN
2	Meningkatkan kapasitas kelembagaan	Mewujudkan laboratorium lingkungan yang terakreditasi	Jenis layanan pengujian lingkungan hidup yang terakreditasi	6 Parameter matrik air permukaan, 5 parameter matrik air limbah	10 Parameter matrik air permukaan dan matrik air limbah
			Jenis sertifikat pengujian yang dimiliki aparat	2 Sertifikat	1 Sertifikat
			Sistem manajemen pengujian yang terbentuk (Jenis)	1 Jenis	1 Jenis
3.	Mengembalikan kondisi sumber air, sungai dan danau sebagai sumber kehidupan masyarakat, menjaga kualitas air, udara, tanah & lingkungannya agar terhindar dari kehancuran sistem nilai hayati	Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati	Jumlah dokumen lingkungan yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen
			Basis data lingkungan hidup yang operasional (perangkat lunak)	2 Perangkat	2 Perangkat
			Jumlah titik sumur resapan (titik)	-	-
			Jumlah titik biopori (titik)	20 Titik	20 Titik
		Meningkatkan pengamanan sumber mata air	Prosentase mata air yang diamankan (titik)	5 Titik	5 Titik
4.	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan mengedepankan sinergitas antar instansi dan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan bidang lingkungan hidup	Sistem informasi perizinan lingkungan hidup (perangkat lunak yang operasional)	-	-
			SOP Perizinan lingkungan hidup	SOP Tata Cara Penilaian Amdal, Pemeriksaan Dokumen UKL – UPL an Persetujuan Lingkungan	SOP Tata Cara Penilaian Amdal, Pemeriksaan Dokumen UKL – UPL an Persetujuan Lingkungan
			Aparat bersertifikat amdal	7 Orang	7 Orang
			Jumlah sekolah yang dibina (Prog. Adiwiyata)	-	-

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2023	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
5.	Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.	Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan meningkatkan baku mutu lingkungan	Jumlah titik pantau kualitas air (titik)	6 Titik	6 Titik
			Jumlah titik pantau kualitas udara (titik)	3 Titik	3 Titik
			Jumlah titik pantau kualitas tanah (titik)	-	-
6.	Penegakkan hukum Lingkungan.	Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Lingkungan sesuai peraturan yang berlaku	Dokumen evaluasi dari pengaduan atau pengawasan Bersama sanksi administratif	11 Sanksi Administratif perusahaan di Kabupaten Purwakarta	11 Sanksi Administratif perusahaan di Kabupaten Purwakarta
7.	Verifikasi pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan.	Meningkatnya pelayanan pengelolaan pengaduan	Dokumen pengelolaan pengaduan	1 Dokumen	1 Dokumen
8.	Tersedianya Pakaian Lapangan Petugas Lapangan Angkutan Sampah dan Peyapuan DLH	Petugas Lapangan Angkutan Sampah dan Peyapuan DLH menggunakan seragam lapangan yang sama	Tersedianya Pakaian Lapangan Petugas Lapangan di Bidang Pengelolaan Sampah	450 Stel	450 Stel
9.	Terpeliharanya Kendaraan Angkutan Persampahan dan kendaraan operasional penunjang secara rutin/berkala	Kendaraan Angkutan Persampahan dan kendaraan operasional penunjang dapat beroperasi dengan baik	Terpeliharanya 8 unit Arm Roll, 26 unit Dump Truck, 1 unit Compactor fuso, 21 unit pick up	Terpeliharanya 8 unit Arm Roll, 26 unit Dump Truck, 1 unit Compactor fuso, 21 unit pick up	Terpeliharanya 8 unit Arm Roll, 26 unit Dump Truck, 1 unit Compactor fuso, 21 unit pick up
10.	Terpenuhinya kebutuhan ban dan aki Kendaraan Angkutan Persampahan dan kendaraan operasional penunjang	Terpenuhinya kebutuhan ban dan aki Kendaraan Angkutan Persampahan dan kendaraan operasional penunjang	Terpenuhinya kebutuhan ban 5 pes untuk roda 4, 7 pes untuk roda 6 dan 2 pes aki untuk roda 6 dan 1 pc untuk roda 4	Terpenuhinya kebutuhan ban 5 pes untuk roda 4, 7 pes untuk roda 6 dan 2 pes aki untuk roda 6 dan 1 pc untuk roda 4	Terpenuhinya kebutuhan ban 5 pes untuk roda 4, 7 pes untuk roda 6 dan 2 pes aki untuk roda 6 dan 1 pc untuk roda 4
11.	Tersedianya ekstra fooding untuk Petugas Lapangan Angkutan Sampah dan Peyapuan DLH	Terpenuhinya kebutuhan ekstra fooding untuk Petugas Lapangan Angkutan Sampah dan Peyapuan DLH	Terpenuhinya kebutuhan ekstra fooding untuk Petugas Lapangan Angkutan Sampah dan Peyapuan DLH minimal 2x dalam 1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan ekstra fooding untuk Petugas Lapangan Angkutan Sampah dan Peyapuan DLH minimal 2x dalam 1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan ekstra fooding untuk Petugas Lapangan Angkutan Sampah dan Peyapuan DLH minimal 2x dalam 1 tahun
12.	Tersedianya peralatan teknis untuk Petugas Lapangan Angkutan Sampah dan	Terpenuhinya peralatan teknis untuk Petugas Lapangan Angkutan Sampah dan	1 paket peralatan teknis	1 paket peralatan teknis	1 paket peralatan teknis

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2023	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
	Peyapuan DLH	Peyapuan DLH			
13.	Tersedianya Mesin Potong Rumput	Terpenuhinya Mesin Potong Rumput	9 unit	9 unit	9 unit
14.	Tersedianya 1 unit Kendaraan Angkutan Persampahan jenis compactor	Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	1 unit	1 unit	1 unit
15.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Ketaatan Perusahaan/Industri Terhadap Regulasi/Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen Berita Acara Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup	25 Perusahaan	25 Perusahaan
16.	Verifikasi Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah Dan Limbah B3	Meningkatnya jumlah perusahaan industri yang memiliki izin dalam pengelolaan Lingkungan	Dokumen Persetujuan Teknis	40 Perusahaan	40 Perusahaan
17.	Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Perusahaan Yang Taat Terhadap Regulasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen Berita Acara Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	20 Perusahaan
18.	Pemantauan Kualitas Air Permukaan Sungai Cilamaya	Terpantaunya kualitas data pemantauan kualitas air sungai dan Kualitas Udara	Jumlah titik pantau kualitas air (titik)	6 Titik	6 Titik
			Jumlah titik pantau kualitas udara (titik)	3 Titik	3 Titik
19.	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Sungai Citarum	Jumlah Sungai	-	2 Sungai